



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 762/III/2013

II/MARET 2013



DPR Ingin Indonesia Menjadi Mediator Perdamaian Korea Utara dan Selatan

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MARET 2013

Kegiatan AKD DPR-RI pada minggu kedua bulan Maret ini tetap terfokus pada berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan serta kegiatan lain-lain. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu kedua Maret 2013.

Kegiatan Bidang Legislasi

Pada minggu pertama bulan Maret, Komisi III melakukan Raker dengan MenkumHam mewakili presiden RI dalam rangka penjelasan pemerintah terhadap dua RUU yang sudah diprogram dalam Prolegnas, yaitu: [1] RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan [2] RUU tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi dan pembahasan rancangan jadwal dan mekanismenya.

RUU KUHP

Penjelasan atas RUU KUHP intinya adalah, bahwa penyusunan KUHP nasional yang baru, bertujuan untuk menggantikan KUHP warisan Pemerintah Kolonial Belanda dengan segala perubahannya yang masih berlaku berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD NRI tahun 1945. KUHP ini berlaku sebagai hukum positif secara nasional berdasarkan UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No 73 tahun 1958, yang kemudian dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan.

Makna pembaharuan KUHP nasional ini, yang semula semata-mata diarahkan kepada misi tunggal, yaitu “dekolonisasi” KUHP dalam bentuk “rekodifikasi” dalam sejarah perjalanan bangsa, baik perkembangan nasional maupun internasional, mengandung pula misi yang lebih luas yaitu misi “demokratisasi hukum pidana”, “konsolidasi hukum pidana”, serta “adaptasi dan harmonisasi” terhadap perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, hukum pidana, maupun perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma-norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



internasional. RUU KUHP terdiri dari dua buku, yaitu Buku Kesatu yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Buku Kedua yang mengatur mengenai Tindak Pidana, yang secara keseluruhan memuat 766 pasal.

KUHP nasional ini menganut sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional, sehingga Buku Satu (Ketentuan Umum) berlaku juga bagi UU diluar KUHP dan Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh UU dan UU diluar KUHP dinyatakan tetap berlaku, sepanjang materinya tidak diatur dalam RUU KUHP.

RUU KUHAP

Penjelasan RUU tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU ini merupakan upaya nyata dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan melakukan pembaharuan hukum acara pidana nasional menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas dan wewenangnya, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, struktur ketatanegaraan, perkembangan hukum dan masyarakat, serta berbagai Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia yang terkait dengan penegakan hukum. UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berlaku selama lebih dari 30 tahun, tentunya sangat memerlukan penyempurnaan secara komprehensif. Perubahan UUD, berbagai Konvensi Internasional yang terkait dengan Hukum Acara Pidana, serta modernisasi teknik dan sistem pembuktian hukum acara pidana merupakan beberapa alasan utama diperlukannya penyempurnaan secara komprehensif terhadap KUHAP. RUU ini secara keseluruhan memuat 286 pasal, beberapa substansi pokok antara lain: [1] mempertegas adanya asas



legalitas demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup acara pidana. [2] acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata-cara yang diatur dalam UU sehingga peraturan perundang-undangan di bawah UU tidak boleh mengatur substansi hukum acara pidana. [3] terjaminnya keseimbangan antara wewenang penyidik, penuntut hukum, dan hakim, dengan hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Landasan filosofis pembaharuan hukum acara pidana adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta membatasi kewenangan alat-alat negara, khususnya penyidik dan penuntut umum secara proporsional dan bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat dan perlindungan hukum, serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUDN RI tahun 1945. Dengan demikian, RUU KUHAP ini telah mengakomodir konsep *restorative justice* guna menjaga keseimbangan kepentingan tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

Dalam RUU KUHAP ini, Pemerintah memandang perlu adanya pengaturan mengenai masa transisi (*engagement period*) guna memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagi penegak hukum dalam menerapkan KUHAP yang baru. Direncanakan, KUHAP yang baru mulai berlaku enam bulan sejak diundangkannya, sedangkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus sudah dibentuk paling lambat dua tahun sejak KUHAP baru diundangkan.

Kegiatan Bidang Pengawasan

Rapat Tim Pengawas Century dengan Menkumham, Menkeu, Kapolri, Jaksa Agung, Dubes RI di Swiss, dan Konjen RI di Hongkong pada tanggal 13 Maret 2013 antara lain menyimpulkan: Tim Pengawas Century memandang tim penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana terkait kasus PT. Bank Century Tbk di luar negeri belum optimal dalam melakukan langkah/tindakan untuk *asset recovery*, karena mengalami banyak persoalan / kendala.

Untuk itu, Tim Pengawas Century meminta Tim tersebut melakukan tindakan secara cepat, melakukan terobosan, menyampaikan laporan secara periodik mengenai aset yang berada di luar maupun di dalam negeri, di antaranya laporan mengenai berapa nilai aset dan tempatnya secara spesifik, dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk KBRI di Swiss dan Konjen RI di Hongkong, atau perwakilan RI yang berada di luar negeri yang terindikasi adanya aset Bank Century.

Komisi VII melakukan Raker dengan Dirut PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. dengan agenda Evaluasi Kinerja tahun 2012 dan Rencana Kerja tahun 2013. Kesimpulan rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII antara lain: Komisi VII meminta Dirut PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM) untuk memberikan laporan detail terkait operasi PT. ANTAM di berbagai daerah, diantaranya penggunaan barang dan jasa dalam negeri, mengutamakan tenaga kerja setempat, ke-

terlibatan perusahaan lokal sesuai amanat UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Komisi VII juga meminta Dirut PT ANTAM untuk menyampaikan laporan dana jaminan reklamasi pasca-tambang, kegiatan reklamasi pasca-tambang, serta pengelolaan lingkungan hidup. Menyampaikan rencana penutupan tambang (RPT) sesuai peraturan perundang-undangan. Komisi VII meminta kepada Dirut PT ANTAM untuk membuat progres kajian terhadap dampak operasi PT ANTAM, khususnya dampak ekonomi, lingkungan dan sosial.

Raker Komisi X dengan Menpora pada 6 Maret 2013, dengan agenda Laporan Pelaksanaan APBN TA 2012 dan Pembahasan Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI tahun 2012, menyimpulkan: dalam laporan APBN 2012, Komisi X menilai bahwa, daya serap pelaksanaan APBN TA 2012 oleh Kemenpora yang mencapai 53,31% atau sebesar Rp. 941.735.840.022,- dari total Pagu APBN TA 2012 sebesar Rp. 1.766.304.468.000,- belum optimal. Oleh karena itu, Kemenpora perlu meningkatkan kinerjanya pada TA 2013 supaya meningkat diatas 90%. Komisi X juga mendesak untuk melakukan perbaikan proses perencanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang, terutama dalam menetapkan target sasaran dan alokasi anggaran kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dicapai secara maksimal.

Mengenai Pembahasan Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI tahun 2012, Komisi X berkesimpulan mendorong Kemenpora untuk menyelesaikan tidak lanjut seluruh rekomendasi HAPSEM I TA 2012 BPK-RI dan perlu mengupayakan agar tidak terjadi temuan serupa pada tahun 2013. Kemenpora diminta untuk meningkatkan pengendalian internal dan memperbaiki tata kelola dalam proses pengadaan barang dan jasa agar dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan tidak menjadi temuan BPK-RI. Mendorong Kemenpora untuk melakukan langkah-langkah hukum dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI dan tidak hanya berhenti pada pemberian saksi administrasi pada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran anggaran.

Penetapan Pejabat Publik

Kegiatan lain-lain dilakukan oleh Komisi III dengan agenda rapat klarifikasi kepada Hakim Konstitusi, yaitu Dr. H.M. Akil Mochtar, SH. MH., apakah bersedia dipilih kembali menjadi Hakim Konstitusi untuk masa jabatan berikutnya. Dr. Akil Mochtar SH. MH., memberikan pernyataan bersedia melanjutkan masa jabatan berikutnya dengan seijin dan dukungan anggota Komisi III DPR-RI. Atas pernyataan tersebut, Komisi III menyetujui apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Untuk itu, Komisi III akan mengadakan rapat pleno kembali, apakah Hakim Konstitusi Dr. Akil Mochtar SH. MH., akan dilakukan *fit and proper test* sebagaimana Hakim Konstitusi atau langsung ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi untuk jabatan berikutnya.

Diplomasi Parlemen

Ketua DPR RI DR. H. Marzuki Alie beserta Delegasi DPR RI akan menghadiri Pertemuan Forum *Civil Society Organization* dan Para Anggota Parlemen Kawasan Asia-Pasifik mengenai Agenda Percepatan MDGs dan Agenda Pambang-

unan Pasca 2015, yang akan diadakan di Bali pada tanggal 25–26 Maret 2013. Ketua DPR RI akan memberikan “Opening Remarks” dalam pertemuan tersebut, yang dimaksudkan untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai dari komitmen global *Millennium Development Goals* (MDGs), serta untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengusahakan pencapaian yang maksimal dari komitmen global MDGs, seperti yang sebelumnya telah disepakati dalam pertemuan puncak PBB 2010.

Delegasi DPR RI dalam pertemuan tersebut juga akan memberikan beragam masukan mengenai poin-poin isu penting yang akan menjadi bagian dari agenda kerangka

pembangunan pasca 2015 yang komprehensif (*broad-based and comprehensive post-2015 development framework*), di antaranya mengenai isu kesenjangan ; kerawanan dan pengucilan ; tantangan pengetahuan ; pembangunan lingkungan yang berkelanjutan ; perdamaian dan keamanan ; pemerintahan dan defisit akuntabilitas pada setiap tingkat ; perubahan dalam sector demografis ; pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja dan lainnya. Komitmen dari Para Pihak untuk melanjutkan agenda pembangunan *Millennium Development Goals* pasca 2015 akan diperkaya melalui pertemuan di Bali tersebut, sebagaimana sebelumnya juga telah mengemuka dalam pertemuan Rio+20. **

DPR Ingin Indonesia Menjadi Mediator Perdamaian Korea Utara dan Selatan

Berbagai Pandangan mengemuka terkait konflik Luar Negeri antara Korea Utara dan Korea Selatan, Komisi I DPR RI menginginkan Indonesia menjadi mediator terwujudnya perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan.

“Indonesia ingin lebih berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah Korea Utara dan Korea Selatan,” kata Anggota Komisi I Sidarto Danusubroto, saat Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri RI, di Gedung Parlemen RI, Senin (11/3).

Oleh karena itu, Sidarto berpandangan bahwa sebaiknya Indonesia abstain saja terhadap masalah penjatuhan sanksi kepada Korea Utara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Saya berharap adanya dialog yang harus kita tingkatkan. Kalau kita Abstain, kita akan lebih diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, sebab kita menjaga stabilitas kawasan,” papar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Sidarto juga mengungkapkan adanya keinginan rencana Komisi I DPR mengunjungi Korea selatan dan Korea Utara, sebagai hubungan Parlemen to Parlemen, sebagai upaya parlemen Indonesia menjaga stabilitas kawasan.

Selain itu, Evita Nursanty (F-PDIP) menginginkan Kementerian Luar Negeri RI memandang ancaman-ancaman menjadi peluang bagi Indonesia. Salah satunya mengenai konflik yang terjadi di semenanjung korea, yang menimbul-



Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty (F-PDIP).

kan perselisihan antara Korea selatan dan Korea Utara. “Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk membuka dialog untuk perdamaian,” katanya.

Hal senada disampaikan, Lily Wahid dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ikut berperan menciptakan perdamaian dunia. “Kementerian luar negeri harus dapat memanfaatkan hal yang ada untuk lebih meningkatkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia,” tegas Lily.

Menurut Lily Wahid hubungan Indonesia - Korea Utara, sejak 1955 Indonesia memegang peranan penting di dunia.

Ada suatu kondisi antara negara Indonesia dan Korea Utara mempunyai sejarah positif antara mantan Presiden RI Soekarno dengan Korea Utara.

Selanjutnya dia mengatakan Kementerian Luar Negeri harus dapat memanfaatkan hal yang ada untuk lebih me-

ningkatkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. "Korut dan Korsel sulit mengadakan perundingan diantara mereka, Indonesia harus ikut berperan menciptakan perdamaian dunia." Kata Lily Wahid. (as), foto : od/parle/hr.

Timwas Century Minta Laporan Pengembalian Aset Secara Periodik



Anggota Timwas Century Sidarto Danusubroto saat menyampaikan pertanyaan.

Timwas DPR meminta Tim Penanganan Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana Kasus Bank Century untuk melaporkan secara periodik tentang aset Century beserta nilai dan tempatnya, di dalam maupun luar negeri.

Sudah 87 kali Timwas Kasus Bank Century melakukan rapat bersama dengan pihak terkait jajaran pemerintahan, namun hingga saat ini Timwas DPR belum melihat hasil yang maksimal. Untuk itu, Timwas meminta pemerintah melakukan tindakan yang cepat kepada Dubes Swiss dan Konjen Hongkong atau KBRI lainnya dimana teridentifikasi adanya aset Bank Century untuk digunakan sebagai pengembalian dana nasabah.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin rapat Timwas Kasus Bank Century DPR, dengan Menkumham Amir Syamsudin, Menkeu Agus Martowardojo, Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo, Jaksa Agung Basrief Arif, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Akting Konjen RI untuk Hongkong, Hari Budiarto, Rabu (13/3), Senayan Jakarta.

"Rapat ini sudah terlalu lama, kita ingin pemerintah ada target untuk menyelesaikan

masalah ini. Kalau memang pencarian aset Century di luar negeri menemui kesulitan, saya minta untuk tidak terfokus di luar negeri saja, melainkan juga aset mereka yang berada di dalam negeri. Aset Irjenpol Djoko Susilo saja yang 34 buah bisa ditelusuri, masak aset mereka tidak bisa," tegas Fahri Hamzah, anggota Timwas Century dari Fraksi PKS.

Ditambahkan Sidarto Danusubroto dari Fraksi PDIP, kemenangan pemerintah RI terhadap pengembalian aset Century sangat sulit, belum ada riwayat kita menang, kecuali saat kasus Pertamina di Singapura. Jika hal tersebut terjadi, maka lebih baik memfokuskan pada eksekusi aset Century di dalam negeri, sehingga hal tersebut bisa digunakan sebagai pengembalian dana nasabah.

Seperti diketahui berdasarkan Hong Kong Court Orders tanggal 30 Maret 2012 Department of Justice (DOJ) melalui pengadilan Hongkong telah melakukan pembekuan aset bank Century dengan menunjuk Price Waterhouse Cooper (PWC) sebagai receiver yang akan mengelola dan menganalisa aset-aset yang telah dibekukan tersebut, yang nilainya berkisar 1,6 Miliar Dolar AS. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Penetapan Sita Pengadilan Negeri Jakpus no. 399/PID.B/2010/PN.JKT.PST yang diperkuat dengan Fatwa MA yang memberikan penafsiran atas putusan tersebut untuk bisa sepenuhnya dilaksanakan.

Meski hal tersebut mendapat perlawanan dari tergugat, Robert Tantular, Hartawan Aluwi, Hesham Al Warraq, na-



Anggota Timwas Century Fahri Hamzah.



Dubes Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo dan Aktng Konjen RI untuk Hongkong Hari Budiarto.

mun Menkumham, Amir Syamsudin berharap Pemerintah melalui Konjen Hongkong dengan menggunakan MLA (*Mutual Legal Assistance*) akan bisa melobi dan meyakinkan DOJ Hongkong untuk mengabulkan permintaan pengambilan kembali aset bank Century dan kemudian dicairkan sehingga bisa langsung diberikan kepada para nasabah.

Bertolak belakang dari usaha Konjen di Hongkong, Tim Penanganan Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana Kasus Bank Century Tbk di Swiss malah menemui jalan buntu. Pasalnya akibat sejak sepuluh bulan yang lalu Dubes RI di Swiss tidak dilibatkan dalam tim tersebut, membuat kinerja tim menjadi nihil.

“Sejujurnya saya kecewa dengan kedua Tim ini, tidak ada progress. Di Hongkong meski sudah dibekukan tapi belum jelas kapan bisa dikembalikan dan dicairkan. Sementara di Swiss juga belum dibekukan. Berdayakanlah dubes-dubes kita di negara-negara yang teridentifikasi adanya aset century,” tegas Syarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura.

Tegur Wamenkumham

Di bagian lain sejumlah anggota Timwas meminta Menkumham, Amir Syamsudin untuk menegur Wamenkumham, Denny Indrayana. Pasalnya dalam beberapa kesempatan Denny kerap menyebut dirinya sebagai Ketua Tim Penanganan Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana dalam Kasus Bank Century

Timwas menilai selama ini Denny sudah bertindak sebagai Ketua Tim Penanganan Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana dalam Kasus Bank Century. Hal tersebut terlihat dari pengakuan-pengakuannya di media massa. Selain itu sudah beberapa kali Denny mengunjungi Swiss dan Hongkong untuk tugas dan keperluan yang berkaitan dengan kasus Bank Century.

Padahal dalam Perpres no.9 tahun 2012 tertanggal 20 Januari dijelaskan bahwa Presiden menugaskan kepada Menteri Hukum dan HAM, Mesesneg, Menkeu dan Jaksa Agung untuk melakukan penanganan pengembalian aset hasil tindak lanjut pidana terkait kasus PT Bank Century Tbk yang berada di luar negeri.

Bahkan yang sangat disesalkan, dalam kepergiannya ke Negara Swiss tersebut, Denny tidak berkordinasi dengan KBRI di Swiss. Akibatnya, *Mutual Legal Assistance* (MLA) terhenti. Padahal selama ini Tim terpadu pencari terpidana tersangka korupsi dibawah pimpinan Wakil Jaksa Agung Darmono mampu bekerja secara pro aktif dengan KBRI di Swiss.(ayu,mp)

DPR Harapkan Bahrain Segera Buka Kedutaan di Indonesia



Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima Delegasi Parlemen Bahrain Abdulrahman Rashid Bumjaid.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengharapkan Bahrain segera membuka Kedutaan Besarnya di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk semakin mempererat kerjasama antar kedua negara.

“Pemerintah dan parlemen Indonesia mengharapkan pemerintah Bahrain segera memiliki duta



besarnya di Indonesia,” Kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung se usai menerima delegasi Parlemen Bahrain Abdulrahman Rashid Bumjaid, di Gedung Nusantara III, Kamis, (4/3).

Pramono mengatakan, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dan dengan dibukanya kedutaan besar Bahrain di Indonesia nantinya dapat mendorong peningkatan volume perdagangan antar kedua negara.

“Ini menjadi awal baik untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara, karena memang kedua negara sedang tumbuh dan berkembang,” tambahnya.

Ketua Delegasi Parlemen Bahrain Abdulrahman Rashid Bumjaid mengharapkan, Indonesia dapat mempermudah perijinan bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia serta mendorong kerjasama ekonomi antar kedua negara. “Kita mengundang Indonesia untuk memamerkan produk unggulannya di negara Bahrain,” katanya.

Menurut Abdulrahman, Bahrain secara khusus mengundang pimpinan DPR untuk berkunjung kesana guna membicarakan berbagai kemungkinan kerjasama dengan Indonesia. (si)

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Lantik Ketua BK Baru



Ketua BK baru Trimedya Panjaitan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan resmi dilantik menjadi Ketua Badan Kehormatan DPR. Trimedya menggantikan politikus PDIP lainnya, M Prakosa. Pelantikan Trimedya dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di ruang BK di Gedung DPR, Kamis, (14/3).

Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, pergantian Ketua BK secara resmi mulai Senin (18/3) namun pelantikan dilakukan pada hari ini. “Ini secara resmi Fraksi PDIP telah mengadakan perubahan penugasan di Badan Kehormatan, saudara M. Prakosa digantikan Trimedya Panjaitan,” kata Taufik saat melantik Trimedya di ruang Badan Kehormatan.

Se usai acara pelantikan, Trimedya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Fraksi PDIP yang memberikan posisi baru bagi dirinya, tugas ini merupakan amanah dan menjadi tantangan yang berat, karena BK menjadi penjaga moral 560 anggota DPR. “Posisi DPR hari ini, adalah posisi yang sulit dan BK menjadi penjaga moral bagi anggota DPR,” paparnya. (si)

Agus Martowardojo Bebas dari Transaksi Mencurigakan

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz menyatakan, berdasarkan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), rekening milik Agus Martowardojo selaku calon Gubernur Bank Indonesia tidak terdapat transaksi mencurigakan. Agus merupakan Menteri Keuangan yang dicalonkan oleh Presiden menggantikan Gubernur BI Darmin Nasution, untuk periode 2013-2018.

“Berdasarkan database PPATK tersebut, kesimpulannya Agus tampak baik-baik saja. Dia aman. Tapi ini belum sampai penelusuran rekening gendut,” jelas Harry usai rapat internal dengan PPATK di Gedung Nusantara I, Rabu (13/3) siang



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz.

Harry menuturkan, database yang dimiliki PPATK untuk menelusuri rekam jejak Agus didapat dari laporan perbankan, Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Direktorat Jenderal Pajak, serta transaksi luar negeri. Komisi XI menggunakan data dari PPATK, karena untuk menelusuri seluruh transaksi pejabat negara, instansi ini berhubungan dengan 120 negara.

Terkait dengan korupsi Hambalang, Komisi XI juga menanyakan hal itu kepada PPATK, apakah ada dugaan keterlibatan Agus dalam kasus itu. Menurut PPATK, tidak ada aliran dana di rekening Menteri Keuangan itu terkait kasus Hambalang. Sedangkan menyangkut transaksi lainnya di luar database PPATK, Harry menambahkan, hal itu di luar pengetahuan PPATK maupun Komisi XI.

“Laporan PPATK akan menjadi sumber informasi bagi Komisi XI, dalam mengambil keputusan dalam *fit and proper test* calon Gubernur BI. Apakah percaya atau tidak kepada PPATK, itu kembali kepada *judgment* masing-masing anggota,” jelas Harry. (sf)

Pemberian Kewarganegaraan RI Harus Selektif

Sejumlah anggota Komisi III mengingatkan agar kewarganegaraan RI tidak diberikan dengan mudah apalagi kepada pengusaha yang datang hanya mencari keuntungan. Hal ini mengemuka dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan sebagai pengusul pemberian kewarganegaraan kepada pengusaha India, Madhu Koneru.

“Investor jangan hanya datang mencari keuntungan apalagi Madhu Koneru pengusaha India ini juga bergerak di bisnis tambang batubara. Kita perlu menilainya, apalagi dia berjanji membawa investasi sebesar \$5 miliar dollar, ini sangat besar tapi apa itu bisa difaktualkan. Kita harus teliti dan selektif,” kata anggota Komisi III Edi Ramli Sitanggang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/13).

Sementara itu anggota Komisi III M. Nurdin menyampaikan informasi yang diperolehnya ayah dari Madhu Koneru adalah pengusaha bermasalah. “Apa benar atau tidak ayahnya Madhu Koneru itu ada masalah di negaranya, membangun rumah dengan harga tinggi tapi dilaporkan kepada pemerintah dengan harga rendah. Saya khawatir uang itu merupakan hasil kejahatan di negaranya, mohon diberikan bahan terkait masukan ini,” ungkap Nurdin.

Anggota FPDIP Ichsan Soelistio mempertanyakan kriteria telah berjasa bagi negara. “Saya rasa terlalu prematur kalau membuka usaha yang memperkerjakan 400 orang dianggap berjasa, apalagi dia pengusaha batu bara yang sudah cukup banyak di Indonesia,” tandasnya.

Pimpinan sidang Aziz Syamsuddin meminta pemerintah terutama Mendag Gita Wiryawan sebagai pengusul melengkapi sejumlah data yang diperlukan. “Pandangan 9 fraksi dalam pleno akan jadi pegangan pimpinan dalam mengeluarkan surat apakah kita dapat berikan persetujuan atau tidak beri persetujuan,” tegas Aziz yang juga Wakil Ketua Komisi III.

Komisi III membahas usulan ini berdasarkan ketentuan pasal 20 UU no.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI yang berbunyi; Orang asing yang telah berjasa kepada negara



Anggota Komisi III DPR Edi Ramli Sitanggang.

Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. (iky) foto:od/parle/ry

Industri Pengolahan Ikan Domestik Menurun

Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy mengatakan selama lima tahun terakhir industri pengolahan ikan domestik terus menurun, bahkan terpaksa tutup akibat kesulitan bahan baku. Di tengah masalah ini, sepatutnya pemerintah mengupayakan sumber daya ikan didaratkan di dalam negeri agar diolah, bernilai tambah, dan menyerap lapangan kerja.

Pengaturan Kementerian Kelautan yang melepaskan kapal 1.000 GT untuk memasok ikan ke luar negeri tanpa ada kewajiban untuk memasok kebutuhan domestik mengisyaratkan kebijakan yang neoliberalistik. Ketentuan itu juga memukul upaya Indonesia lepas dari penghasil produk primer.

“Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengistimewakan kapal ikan pukat cincin berbobot mati di

atas 1.000 gros ton untuk mengangkut ikan ke luar negeri wajib ditinjau ulang,” kata Romahurmuziy dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, di Jakarta, Rabu (13/3).

Menurut Romahurmuziy, kebijakan itu bertentangan dengan rencana strategis pemerintah untuk industrialisasi perikanan. Padahal, katanya, Undang-Undang Pangan telah mengamanatkan komoditas pangan harus bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Kami menyerukan ke Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meninjau ulang aturan ini,” ujar Romahurmuziy.

Perlakuan khusus bagi kapal pukat cincin 1.000 gros ton (GT) yang beroperasi tunggal untuk menangkap ikan di perairan lebih dari 100 mil, dan melakukan alih muatan ikan untuk diangkut ke luar negeri tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI.

Senin (11/3) pagi, Komisi IV mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan perikanan tangkap, dengan Dirjen Perikanan Tangkap Gellwyn Yusuf, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Syahrin Abdurrahman, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Narmoko Prasmadji, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Rizald M. Rompas. (as) foto:ry/parle



Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy.

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Masih Alot di Panja RUU Pilkada

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) terkait mekanisme pemilihan kepala daerah masih menjadi perdebatan di tingkat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di Komisi II DPR.

Beberapa fraksi masih berdebat soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Misalnya saja, Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang memilih pilkada tidak langsung atau melalui pemilihan oleh DPRD.

Menurut Anggota Panja RUU Pilkada dari FPD, Abdul Wahab Dalimunthe, pemilihan kepala daerah langsung menimbulkan mudharat, yakni mengajarkan rakyat yang korupsi. Dan partai politik menarik “uang sampan” dari para calon kepala daerah hingga Rp 5 miliar.

“Dalam pemilu di Sumatera Utara lalu, habis Rp 80 miliar,

dan untuk pengamanan sampai Rp 60 miliar. Sementara rata-rata calon sampai menghabiskan Rp 30 miliar. Untuk apa demokrasi kalau tidak untuk kepentingan rakyat,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pakar, diantaranya guru besar ilmu politik dari UI, Prof Maswadi Rauf dan pakar politik dari UGM, Cornelis Lay di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/3).

Pandangan berbeda datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Anggota Panja RUU Pilkada dari FPAN Herman Kadir menolak ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD. “Itu kemunduran. Kalau kita mau ubah sistem ini, kita sudah mundur ke belakang,” tambahnya.

Menurut Herman Kadir, bila memang persoalannya para calon, maka mekanismenya yang harus diperbaiki. Dia mengutarakan ada beberapa pilkada yang tidak menghabis-



Anggota Panja RUU Pilkada Abdul Wahab Dalimunthe.

kan dana besar. “Caranya, perketat aturan mainnya. Kalau perlu pilkada serentak agar rakyat tidak jenuh,” ujarnya.

Menanggapi perdebatan ini, guru besar ilmu politik dari UI, Prof Maswadi Rauf mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah kemunduran, karena yang bermain hanya elite partai politik. “Ini akan menimbulkan kritik yang sangat tajam. Sebab, dari pemilihan rakyat dikembalikan ke elite parpol,” tukasnya.

Maswadi menambahkan, kalau ada masalah dengan Pilkada bukan demokrasi yang diubah, tapi mekanismenya.

Sementara menurut pakar politik politik dari UGN Cornelis Lay menilai dalam demokrasi yang terpenting bukan pemilihan langsung atau tidak langsung. “Tapi apa yang mau dicapai,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan kehadiran sejumlah pakar ilmu politik dalam RDPU dengan Panja RUU Pilkada dalam rangka untuk memberikan masukan RUU Pilkada akan terus disebut pembahasannya dalam masa sidang kali ini.

“Kita akan minta mereka memberi masukan tentang mekanisme pemilihan yang menurut usulan pemerintah melalui DPRD, terus pilkada serentak, dana penyelenggaraan dan kampanye, juga tentang wakil kepala daerah,” ujar Hakam Naja.

Hakam menambahkan, dalam pembahasan RUU Pilkada juga muncul usulan tentang mekanisme bagi kepala daerah yang akan maju lagi. Calon petahana, begitu biasa disebut, harus nonaktif dari jabatannya. Meskipun pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ketentuan ini diusulkan kembali dalam konten RUU Pilkada.

“Kita semua sedang cari formula yang terbaik. Sebab, memang ada kecenderungan kepala daerah yang sedang menjabat itu menyalahgunakan jabatannya dengan mengerahkan PNS, mengalokasikan dana bansos dan hibah, dan memutasi pegawai,” katanya. (nt)

Komisi VI Himpun Masukan Asosiasi Eksportir

Dua paket RUU yang sedang dibahas Komisi VI DPR RI, yaitu RUU tentang Perdagangan dan Perindustrian masih menghimpun masukan dari berbagai stake holder. Kali ini, mendengar masukan kembali dari 4 asosiasi eksportir. Masukan ini nantinya menjadi referensi untuk mengatur substansi RUU. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan), Rabu (13/3).

Dalam RDPU tersebut hadir masing-masing Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKII), Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Seperti diketahui dua paket RUU ini merupakan usulan pemerintah yang diserahkan kepada DPR RI. Lalu oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR diserahkan kepada Komisi VI untuk dibahas.

Komisi VI DPR RI tentu membutuh-

kan banyak data dan informasi terkait substansi pengaturan mengenai perdagangan dan perindustrian di Indonesia. “Kita menginginkan hasil akhir adalah meningkatkan volume perdagangan khususnya volume perdagangan produk-produk dalam negeri. Di sinilah letak substansi keinginan kita supaya integrated antara RUU perdagangan dengan RUU Perindustrian,” ujar Bima saat membuka rapat.

Draf RUU Perdagangan yang diusulkan pemerintah terdiri dari 16 bab dan 79 pasal. Di antara isinya adalah mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan mikro kecil menengah, perdagangan luar negeri, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Sementara draf RUU Perindustrian terdiri dari 14 bab dan 96 pasal. Isinya antara lain adalah pembangunan sumber daya industri, rencana induk industri nasional, dan peran masyarakat.

“Kita sangat berharap jangan sampai munculnya atau setelah disahkan-



Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima.

nya RUU ini tidak memberikan solutif dari hulunya industri maupun hilirnya perdagangan. Kita tidak menginginkan RUU Perdagangan hanya akan memperkuat produk-produk impor atau melegalisasi produk-produk impor tanpa berpikir pada aspek hilir, yaitu industri nasional kita,” jelas Aria Bima. (mh) foto:od/parle/ry

Komisi III Bahas Permintaan Kewarganegaraan RI bagi Pengusaha India

Komisi III DPR RI menindaklanjuti permintaan pertimbangan terhadap usulan pemberian kewarganegaraan RI kepada Madhu Koneru, pengusaha asal India yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan, Gita Wiryawan. Pertimbangan yang diberikan sesuai ketentuan UU no.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI.



Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin berjabat tangan dengan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan.

“Kita tadi mendengar penjelasan dari Menteri Perdagangan yang mengusulkan kemudian pandangan dari Kemendikham dan BIN. Masukan kita minta tertulis untuk nanti jadi pertimbangan,” kata Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin kepada wartawan usai sidang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/03/13).

Ia menjelaskan permintaan pemerintah tersebut berdasarkan pasal 20 UU no.12/2006 yang berbunyi; Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi

Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

“Keputusan itu tentu perlu pertimbangan supaya nanti jangan terjadi kecemburuan,” lanjutnya. Ia kemudian menggarisbawahi ketentuan pasal 9 pada UU yang sama yang menyebut pada kondisi biasa, kewarganegaraan baru dapat diberikan kepada seseorang yang telah tinggal di Indonesia

selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

Sementara itu Mendag Gita Wiryawan mengatakan Madhu Koneru diusulkan memperoleh kewarganegaraan karena jasa dan komitmennya untuk membangun Indonesia. “Investasi yang telah dan akan dilakukan bukan hanya terkait satu sektor saja, tapi terkait juga upaya membangun infrastruktur sarana prasarana dan bisa memberikan peluang kerja dalam jumlah yang besar,” pungkask dia. (iky) foto:od/parle/ry

Kecelakaan Bisa Diminimalisir Bila Masyarakat Patuhi UU

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama menilai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia sebenarnya bisa diminimalisir apabila pengendara kendaraan bermotor dan masyarakat dalam berlalu lintas selalu mengedepankan UU No. 22 tahun 2009.

“Bisa diminimalisir bila dalam berlalu lintas kedepankan perijinan, sarana dan prasarana kendaraan, kondisi jalan, dan rambu-rambu lalu lintas khusus pada jalan yang padat lalinnya, kemudian uji berkala serta SIM,” ujar politisi dari Fraksi PAN ini, saat membuka Raker dengan Kemenhub dan jajarannya, di Gedung DPR, Rabu, (13/3).

Menurut Laurens, Komisi V DPR ingin mendapatkan info resmi terkait kecelakaan di berbagai wilayah Indonesia.



Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama.

“Kita juga ingin mengevaluasi kembali strategi dan kebijakan transportasi nasional,” katanya.

Dia mengharapkan, tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban. “Kita harapkan bila konsisten

dalam menegakkan aturan lalu lintas maka korban akan berkurang,” tambahnya.

Seperti kita ketahui, belum lama ini telah terjadi Kecelakaan lalu lintas yang memprihatinkan, melibatkan Bus Mustika Mega Utama di Puncak Ciloto, Cianjur, Jabar pada Rabu 27 Februari 2013, pukul 17.30 WIB, dengan korban 17 orang meninggal, 26 luka berat dan 32 luka ringan.

Sementara di Simalungun, Sumut juga terjadi Kecelakaan Bus kope-rasi dengan Korban tujuh orang meninggal dunia, tiga orang luka berat, dan 14 orang luka ringan. kasus lain juga terjadi di Sumedang, melibatkan mobil truk mitsubishi diesel dan mobil minibus pada tanggal 6 Maret lalu, dengan korban delapan orang meninggal, serta empat orang luka-luka. (si) foto:ry/parle

Perry Lebih Unggul Daripada Hendar

Komisi XI semalam, Kamis (14/3) secara aklamasi memilih Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Budi Mulya. Sebelumnya, Perry menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur BI. Perry mengungguli suara koleganya, Hendar yang menjabat Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI.

“Keduanya (Perry dan Hendar) sama-sama bagus. Mereka memiliki visi dan misi yang bagus untuk diterapkan ke depannya untuk BI, dan sama-sama menguasai bidang moneter. Namun semua dikembalikan kepada masing-masing fraksi,” jelas Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang saat dihubungi Tim Parle tadi pagi, Jumat (15/3).

Andi menyatakan, Perry lebih menguasai bidang moneter dibanding kompetitornya, Hendar. Selain itu, sebagian besar anggota Komisi XI juga terkesan dengan konsep keber-



Deputi Gubernur BI terpilih Perry Warjiyo.

pihkan Perry terhadap petani serta pelaku usaha kecil dan menengah. Perry berjanji akan membuat kebijakan yang pro rakyat ketika nantinya menjabat Deputi Gubernur BI.

“Saya ini orang desa. Saya ini anak petani. Jadi dari kecil hingga besar saya abdikan seluruh pemikiran dan langkah saya untuk berkontribusi pada perekonomian nasional,” kata Perry.

Diakui Perry, keberpihakan itu merupakan panggilan jiwa. Secara alamiah ia mengaku tergerak untuk meningkatkan produksi pertanian. Ia tegas menyatakan mendukung ekonomi kerakyatan. Ia juga menyatakan bahwa UU Hortikultura diperlukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

“Karena itu, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait kenapa produksi hortikultura kita lemah. Apakah ada kendala dalam kredit atau ada masalah cuaca. Barangkali perlu asuransi mengenai ketidakpastian cuaca seperti ini,” jelas Perry. (sf)

Barang Impor Harus Diseleksi Ketat

Masuknya barang-barang impor ternyata banyak merugikan importir dan konsumen di dalam negeri. Kualitas barangnya sangat buruk. Pengawasan di bea cukai harus diperketat. Ini semua untuk melindungi industri dalam negeri juga agar tidak kalah dengan produk-produk impor.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI Refrizal (F-PKS) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan AISI, LPEI, HKII, dan GPEI, Rabu (13/3). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) tersebut, beragendakan mendengarkan masukan dari 4 asosiasi eksportir untuk menyusun RUU Perdagangan dan RUU Perindustrian.

Diungkapkan Refrizal, banyak barang impor elektronik yang tidak berkualitas masuk ke Indonesia. Dicontohkannya, produk seperti tv flat dan lampu neon tidak berkualitas dibiarkan bebas masuk begitu saja. Ada lam-

pu neon yang seminggu dipakai sudah rusak. Belum lagi produk buah-buahan seperti jeruk yang sudah busuk ketika berada di tangan konsumen kita. “Bagaimana barang-barang seperti itu bisa masuk?” tanya Refrizal.



Anggota Komisi VI DPR Refrizal.

Di sinilah pentingnya melindungi industri nasional dari serbuan barang-barang impor. “Harus ada perlakuan khusus terhadap industri dalam negeri,” katanya lagi. Pasti ada yang bermain di bea cukai dengan masuknya barang-barang impor berkualitas buruk itu. Akhirnya, industri dalam negeri kita pasti dirugikan. Refrizal memelestikan produk impor itu dengan sebutan produk “Spanyol” alias separuh nyolong.

Sementara Aria Bima saat memimpin rapat juga mengungkapkan, Komisi VI kali ini banyak belajar dari masukan 4 asosiasi eksportir nasional. Dan RUU ini, katanya, cenderung liberal dan kurang mementingkan produk nasional. “RUU ini dibuat saat neraca perdagangan kita minus.” Untuk itu, Komisi VI akan berkunjung ke ITB, ITS, dan UGM untuk menggali lebih dalam *blue print* perindustrian dan perdagangan kita. (mh). foto:od/parle/ry

Pramono Pimpin Delegasi Parlemen ke IPU Ekuador

Wakil Ketua DPR Pramono Anung akan membawa rombongan delegasi Parlemen Indonesia ke Negara Ekuador untuk mengikuti Sidang Parlemen sedunia.

“Kunjungan ini dalam rangka berpartisipasi dalam *Inter Parliamentary Union* (IPU), Sidang parlemen Dunia, di Ekuador,” ujar Pramono sesuai pertemuan dengan Dubes Ekuador, di Gedung Nusantara III, Kamis, (14/3).

Menurut Pramono, Parlemen Indonesia sebanyak 11 orang, direncanakan menghadiri pertemuan IPU dengan salah satu isunya terkait *drugs and trafficking*, selain isu lain dibidang politik dalam negeri, maupun perdagangan. “Rombongan ini juga dihadiri oleh Nurhayati Assegaf yang juga menjabat sebagai ketua parlemen perempuan sedunia,” katanya.

Pada sidang IPU ke 128 di Quito, Ekuador, terdapat berbagai macam agenda



Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat pertemuan dengan Dubes Ekuador.

utama diantaranya komite pertama mengenai perdamaian dan keamanan internasional, komite kedua tentang pembangunan berkelanjutan, keuangan dan perdagangan, terakhir Komite ketiga membahas demokrasi dan HAM.

didalam sidang IPU Ekuador direncanakan seluruh delegasi parlemen juga akan mengikuti debat umum (*general debate*) diantaranya membahas isu sensitif dan aktual seperti isu legalisasi obat terlarang, Hak anak cacat, HAM, maupun kesehatan perempuan dan anak.

Debat yang berlangsung nantinya terkait persoalan politik, ekonomi, dan situasi sosial di dunia bertema “*from unrelenting growth to purposeful development buen vivir : new approaches, new solutions*”.

Kurang lebih 1150 delegasi dari seluruh dunia diperkirakan hadir dalam sidang umum IPU ke 128 di Ekuador pada 22-28 maret mendatang, termasuk juga sekitar 620 anggota parlemen di seluruh dunia hadir akan mengikuti acara sidang tersebut. (si)

Komisi X Dukung Program-program AOI

Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk bersinergi dengan program Asosiasi Olimpien Indonesia (AOI), disertai dengan pemberian anggaran untuk menjalankan program-programnya.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat

si atlet memudar, mereka memiliki ketrampilan dan penghasilan yang memadai sebagai pegangan hidup. Sebut saja pelatihan bahasa Inggris, *homeschooling*, serta asuransi pendidikan dan hari tua bagi atlet pasca berprestasi. Dengan kata lain, AOI akan memberikan pendampingan di masa emas untuk digunakan saat masa keemasannya memudar.



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto dan sejumlah Anggota Komisi X foto bersama Asosiasi Olimpien Indonesia (AOI).

Umum (RDP) Komisi X DPR RI dengan AOI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Utut Adianto Kamis (14/3) ini. Pasalnya selama pemerintah dinilai masih kurang mempedulikan mantan atlet yang pernah menorehkan nama bangsa di kancah internasional itu.

Bahkan tidak sedikit mantan atlet nasional yang dimasa keemasannya disanjung karena berhasil mengibarkan bendera merah putih di negara lain, namun saat masa keemasannya memudar nasibnya sangat memprihatinkan.

Untuk itu, maka AOI terbentuk dan akhirnya memiliki program-program yang khusus ditujukan untuk meningkatkan kualitas diri dari para atlet. Sehingga jika kelak masa emas

Namun untuk menjalankan program diperlukan anggaran, karena itu Lukman Niode selaku Sekjen AOI meminta Komisi X DPR RI untuk mendorong pemerintah membantu AOI berupa anggaran dan pendampingan.

“ UU tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) No.3 tahun 2005 yang dibuat oleh Pak Adhyaksa memang sudah benar, tapi penjabarannya dalam PP harus terus dibenahi. Kami akan tampil sebagai pendamping agar pelaksanaannya berjalan lurus,” ujar Lukman Niode mantan atlet renang.

Presiden AOI Anton Suseno, mantan atlet tenis meja nasional mengatakan, AOI menjadi bagian dari *World Olympic Assosiaton* maka pihaknya bisa mengundang olimpien-

olimpian (atlet yang merah medali di olimpiade) dari negara lain untuk menjadi motivator kepada junior-juniornya beserta pelatihnya.

“Kami juga akan melakukan perekrutan atlet-atlet yang berpotensi dari pelosok daerah lewat kompetisi-kompetisi yang akan terus kami lakukan. Untuk program ini kami bekerjasama dengan TVRI sebagai televisi nasional yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri,” jelas Anton.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI, Djalal Aziz yang menyarankan agar Wakil Ketua Komisi X DPR

RI yang juga menjadi pemegang gelar GM cabang olahraga Catur, Utut Adianto untuk dimasukkan dalam jajaran kepengurusan. Namun, menurut Utut sendiri hal tersebut tidaklah perlu. Bagi Utut untuk membantu program AOI tidak harus berada dalam jajaran kepengurusannya.

Anggota Komisi X DPR RI Dedi Gumelar menilai bahwa DPR RI perlu mendukung program AOI ini, karena peningkatan prestasi atlet secara tidak langsung akan turut membantu pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional secara keseluruhan. (Ayu)

Indonesia Dukung Sanksi PBB Untuk Korut

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan sanksi untuk Korea Utara (Korut) soal produksi senjata nuklir. Indonesia berharap, di Semenanjung Korea bebas dari produksi senjata nuklir, karena ini akan menciptakan efek domino bagi negara-negara di kawasan tersebut seperti Cina, Taiwan, dan Jepang, untuk ikut memproduksi nuklir secara besar-besaran.

Demikian mengemuka dalam perbincangan antara delegasi Majelis Nasional Republik Korea yang dipimpin ketuanya Hon. AHN Hong Joon dengan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Andi Azhar Cakrawijaya (F-PAN), di ruang tamu BKSAP Lt.4, Nusantara III, Senin (11/3). Andi didampingi pula oleh Agus Hermanto (F-PD) Ketua Kerja Sama Parlemen Indonesia-Korea.

Isu di Semenanjung Korea sangat sensitif bagi perdamaian dunia. Hong Joon berharap peran aktif Indonesia dalam memfasilitasi perdamaian kedua Korea. Dan Korea juga ikut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di kawasan ASEAN. Agus Hermanto yang juga Anggota Komisi X DPR menyampaikan, Indonesia siap menjadi fasilitator unifikasi Korea untuk perdamaian.

Unifikasi dipandang penting, karena berdampak pula pada perdamaian dunia, khususnya Asia. Bila unifikasi terwujud, itu juga berdampak pada kerja sama perdagangan di kawasan Asia. “Perdamaian di Semenanjung Korea sangat penting bagi kami,” ungkap Agus dalam pertemuan tersebut. Selain masalah nuklir dan perdamaian, banyak isu pula yang dibicarakan antara parlemen Korea dan Indonesia.

Di bidang pendidikan, kedua negara sudah melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Indonesia telah mengirim banyak pelajar dan mahasiswanya untuk belajar teknik di Korea. Sementara para pelajar dan mahasiswa Korea

juga banyak belajar seni di Indonesia. Khusus soal ini, Agus berharap, pemerintah Korea menyediakan fasilitas kursus bahasa Korea yang memadai bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia.

Sementara di bidang kerja sama militer, Indonesia banyak mengimpor perlengkapan militer dari Korea yang dinilai lebih maju daripada Indonesia. Korea juga menjalin kerja sama di bidang industri baja dengan PT. Krakatau Steel. Hanya saja pihak Korea mempertanyakan masuknya Jepang ke dalam kerja sama ini. Pihak Indonesia, kata Agus, segera akan mempelajari kerja sama ini, agar tidak merugikan semua pihak.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Azhar juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah *South East Asia Parliamentary Against Corruption (SEAPAC)* pada Oktober 2013 dan tuan rumah bagi penyelenggaraan *IPU Parliamentary Session at the 9th Ministerial Conference of the WTO* pada Desember 2013 mendatang. Sementara Hong Joon menyampaikan pada akhir Maret ini, Presiden Korea dan Wakil Menteri Pertahanannya akan berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan kerja sama militer. (mh).foto:ry/parle



Wakil Ketua BKSAP Andi Azhar Cakrawijaya didampingi Ketua Komisi X Agus Hermanto menerima Delegasi Majelis Nasional Republik Korea dipimpin Hon. AHN Hong Joon.

Ketua DPR Terima Kunjungan Dubes Jerman



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Dubes Jerman untuk Indonesia HE. Mr. Dr. Georg Witschel.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jerman untuk Indonesia HE. Mr. Dr. Georg Witschel di ruang kerjanya Gedung DPR, Kamis (14/3). Georg adalah Dubes yang baru 5 bulan bertugas di Indonesia. Tidak ada agenda khusus dalam pertemuan kali ini. Isi pembicaraan sebatas saling memperkenalkan diri, baik tentang kondisi negara, politik, dan bahasa kedua negara.

Georg Witschel mengaku sangat nyaman tinggal di Indonesia. "Saya sangat

senang bekerja, bahkan puas berada di Indonesia," akunya kepada Ketua DPR RI. Dan Georg sudah mampu berdialog dalam bahasa Indonesia walau masih terbatas. Disampaikan Marzuki, Dubes Jerman tersebut mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan Indonesia. Bahkan, mudah diajak bergaul.

Menyangkut politik, ternyata baik Indonesia maupun Jerman sedang menghadapi Pemilu dalam waktu dekat. Sementara soal keanggotaan parlemen, Georg mengungkapkan, di Jerman hampir tak ada anggota par-

lemen yang kaya raya. Calon anggota legislatif yang mendapat suara dipastikan mendapat dana pula dari negara. Jadi, untuk berkampanye meraih suara terbanyak tidak butuh dana besar seperti di Indonesia.

Sebagai negara demokrasi, kata Marzuki, kita bisa saling belajar melihat kelebihan dan kekurangan dari sistem politik yang diterapkan di kedua negara. Di Jerman, pemerintahan yang berkuasa hampir dipastikan berkoalisi dengan sejumlah partai. Tak ada partai yang mayoritas tunggal di Jerman.

Selain itu, Georg juga menyampaikan bahwa pemerintah Jerman punya 4 yayasan yang bergerak di bidang politik. Keempat yayasan tersebut sudah bekerja sama dengan sejumlah parpol di Indonesia. Diskusi dan seminar politik juga kerap digelar oleh 4 yayasan tersebut.

Pada bagian lain, Georg mengatakan, bahasa Indonesia ternyata mudah dipelajari. Tata bahasanya sama dengan Jerman. Tidak sulit, katanya. Sementara buah-buahan di Indonesia juga ternyata sangat enak dikonsumsi oleh orang Jerman. "Buah-buahan Indonesia sangat menarik dan enak," kata Georg. (mh)

Komisi VI Pertanyakan Maksud Dahlan Iskan Melaporkan Diri ke KPK

Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi mempertanyakan status laporan Dahlan Iskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Menteri BUMN atau bukan. Sebagai informasi, pada 27 Februari lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta KPK mengusut proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Timur dan Riau. Dahlan meminta pemeriksaan ulang terhadap seluruh proses tender dengan menghadirkan pihak yang kalah.

"Saya ingin mengetahui apakah laporan Dahlan ke KPK itu dalam rangka sebagai Menteri atau apa? Hal ini harus jelas agar dapat diketahui maksud dan tujuan tindakannya itu," kata Ferrari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Deputi Kementerian BUMN dan Dirut PLN di Gedung Nusantara I, Senin (11/3).

Senada dengan itu, Anggota Komisi VI Azam Azman Nawawijana juga mempertanyakan hal serupa. Azam menilai

tindakan yang dilakukan Dahlan tidak rasional. Pasalnya, Dahlan yang melaporkan, namun ternyata ia juga yang menyetujui dan menandatangani penunjukan pemenang tender. Hal ini dilakukan Dahlan ketika dirinya masih menjabat sebagai Direktur Utama PLN 2009 lalu.



Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi.

“Kan Dahlan yang memutuskan sendiri, menandatangani sendiri, terus kok malah melaporkan dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi. Ini kan aneh. Mau cari panggung atau bagaimana?” tanya Azam.

Menanggapi hal itu, Deputy Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Iman A Saputro menyatakan bahwa laporan Dahlan sebenarnya terkait upaya untuk membendung rumor negatif yang beredar. Pada laporannya ke KPK,

Dahlan menganggap ada isu-isu kecurangan dalam proses tender PLTU di Kaltim dan di Riau, dan melibatkan namanya yang ketika itu menjabat sebagai Dirut PLN.

“Pak Dahlan melaporkan tender proyek PLTU Kaltim dan Riau ke KPK untuk mengetahui tender ini benar atau tidak. Beliau ingin mengetahui bagaimana prosesnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak,” tandas Iman. (sf)

RUU Jasa Konstruksi Dukung Percepatan Pembangunan Nasional

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mengatakan, Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional.

“Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa,” ujarnya saat Kunker spesifik RUU Jasa Konstruksi, di Provinsi Bali, baru-baru ini.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjaannya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi.

Menurut data BPS, kontribusi sektor jasa konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut, di tahun 2010, sektor konstruksi mencapai sekitar 10.25 persen dari Produk Domestik Bruto atau sekitar Rp. 660.89 Triliun, dan menempati peringkat kelima jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

“Sedangkan di tahun 2011, kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB adalah 10.16 persen atau sekitar Rp. 754.483 Triliun dan menempati peringkat keenam,” paparnya.

Sementara untuk tahun 2012, kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB adalah 10.45 persen atau sekitar Rp. 860.9 Triliun serta menempati peringkat keenam dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa dalam tahun 2011, dan 2012 ranking sektor konstruksi menga-



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said.

lami penurunan 1 peringkat dari tahun 2010. RUU Jasa Konstruksi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor konstruksi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi I Menilai Kementerian Luar Negeri Belum Optimal Menangkal Isu Negatif Indonesia

Komisi I DPR RI menilai Kementerian Luar Negeri sebagai Kementerian terdepan yang diamanatkan Pemerintah untuk menangkis isu-isu yang beredar di luar negeri, belum melakukan upaya yang optimal dalam rangka menangkis isu negatif terhadap Indonesia.

“Sekarang ini, kita lihat begitu banyak berita yang mendiskreditkan Indonesia, tidak ada perlawanan dari Pemerintah Indonesia. Cenderung isu

itu hilang sendiri, tanpa ada pembealaan dari pihak Indonesia,” kritik Tantowi Yahya, saat Komisi I Rapat Kerja Dengan Kementerian Luar Negeri, di gedung DPR RI, Senin (11/3).

Politisi dari Partai Golkar ini mengungkapkan di beberapa negara termasuk Amerika, Inggris dan Belanda, bahwa isu Papua masih menjadi perhatian. Isu dalam negeri Indonesia di politisasi baik oleh individu maupun organisasi

sehingga menjadi isu dunia.

Dia menjelaskan dalam beberapa waktu lalu saat Komisi I RDP dengan BIN, bahwa Kepala BIN melaporkan bahwa beberapa tokoh separatisme Papua berkeliaran di luar negeri, seperti Eropa, dan Amerika, salah satunya adalah Benny Wendah.

Kemudian film-film mengenai pelanggaran HAM di Papua terus diputar di negara barat, ada laporan film



Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya.

yang berjudul *Art of Killing* yang bercerita mengenai pembantaian warga negara G30/S, “Dulu sebelum Kemenlu di reformasi, kalau dulu isu yang membusukkan, menjelekkan dan mendiskreditkan Indonesia ditangani oleh instansi setingkat Dirjen di Kemenlu,” katanya.

Selain itu, Tantowi mengutarakan beberapa produk Indonesia dilarang di luar negeri. Misalnya minyak goreng Indonesia di larang oleh negara-negara Eropa karena dinilai merusak lingkungan. Produk perikanan seperti

udang juga dilarang masuk di negara-negara tertentu karena dianggap ada toksid atau lain sebagainya.

Dia melihat ini ada upaya dari negara-negara tersebut untuk tidak mengizinkan produk-produk Indonesia masuk ke negara mereka. Oleh sebab itu, menurut Tantowi harus ada strategi khusus yang dipersiapkan oleh kementerian luar negeri, dengan membuat satgas atau satker dalam rangka melakukan pembelaan dan advokasi terhadap produk-produk Indonesia yang dilarang di luar negeri. (as)/foto:iwan armanias/parle.

Ratifikasi RUU Protokol Nagoya, Komisi VII Pantau Kaltim



Tim Kunlap Komisi VII DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Achmad Farial meninjau kondisi lingkungan Karantina Samboja di Provinsi Kalimantan Timur.

Tim Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Achmad Farial didampingi 12 orang Anggota serta Penjabat Lingkungan Hidup meninjau kondisi lingkungan Karantina Samboja di Provinsi Kalimantan Timur. Ini dilakukan untuk mendalami RUU tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam.

RUU ini merupakan pengesahan Protokol Nagoya tentang akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan pembagian

keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Disamping itu, RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang prosedur persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan peptisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional.

“Ini merupakan Pengesahan dan rencananya kami akan mengesahkan RUU ini minggu depan setelah mengunjungi

Papua, “ ujar Farial di Balikpapan, baru-baru ini.

Pemerintah mengajukan 2 RUU tentang lingkungan untuk disahkan. Farial mengatakan, sebelumnya Wakil Presiden Boediono sudah menegaskan kalau 2 RUU itu penting.

Ratifikasi (pengesahan) Protokol Nagoya penting karena Indonesia merupakan salah satu negara terkaya atas sumber daya genetik. Jika 2 RUU ini disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna, maka Indonesia memiliki landasan hukum untuk melindungi dan melestarikan sumber daya genetik. Serta mencegah pencurian dan pemanfaatan tidak sah terhadap Keanekaragaman hayati.

Disamping itu, Asdep Pengendalian Kerusakan Lahan dan Keanekaragaman Hayati pada Kementerian Lingkungan Hidup, Antung Dedy sangat berharap atas kunjungan Komisi VII DPR RI dapat membuka wawasan semua pihak bahwa Protokol Nagoya penting bagi pembangunan masyarakat. Khususnya dalam pemanfaatan dan menerima keuntungan Sumber Daya Genetik. “Bila ini diimplementasikan, nantinya masyarakat Kaltim akan mendapat keuntungan baik dari pihak luar maupun lokal atas pemanfaatan Sumber Daya Genetik,” ujar Antung. (hr), foto : eka/parle/hr.

Kecelakaan Lalu Lintas Tinggi, Indonesia Darurat Keselamatan Nasional



Raker Komisi V DPR dengan jajaran Kementerian Perhubungan.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas mendorong segera dilakukan penggalangan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menekan angka kecelakaan di Indonesia.

“Mari kita angkat ini sebagai darurat keselamatan nasional, karena masalah kecelakaan telah menimbulkan kerugian besar tiap tahunnya,” ujar anggota DPR Yoseph Hadi (F-PDIP) saat Raker Komisi V DPR dengan jajaran Kemenhub, di Gedung Nusantara, Rabu, (13/3).

Menurut Yoseph, karena kesadaran itu, Komisi V mengundang seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Korlantas, Jasa marga untuk bertekad mengurangi angka kecelakaan di Indonesia.

“UU No. 22 tahun 2009 itu prinsipnya ingin menekan angka kecelakaan dan menciptakan budaya lalu lintas yang baik, dan keselamatan jiwa bagi penggunaannya. “Lalu lintas di Indonesia sekarang ini sebagai salah satu mesin pembunuh karena tidak siapnya prasarana yang ada, karena itu kenapa kita angkat jadi direktorat lalu lintas agar lalu lintas semakin baik kedepannya dan itu semua membutuhkan sumber daya yang kuat,” katanya.

Berdasarkan, UU ini yang menjadi leader adalah pihak kepolisian, sementara Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan sebagai pendukungnya. “Ketika kendaraan sudah di jalan raya itu merupakan tanggung jawab kepolisian, mulai dari pencegahan dan penanganan,” ujarnya.

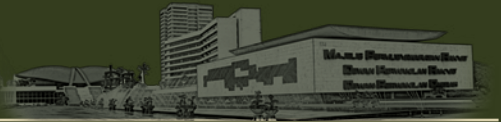
Menurutnya, berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 itu ada namanya forum lalu lintas yang dibentuk dan beranggota-

kan Kepolisian, PU, dan instansi terkait lainnya. “Forum itu dapat melakukan kajian terlebih dahulu dan laporannya diserahkan kepada Komisi V DPR, kita bisa memperdayakan forum itu setelah kita sama-sama menyadari bahwa ini sudah kondisi darurat,” tambahnya.

Sementara *law enforcement* (Penegakan hukum) harus dijalankan termasuk juga masalah kedisiplinan, ketertiban lalu lintas serta sarana dan prasarananya. “Data-data tidak bisa dibohongi karena 30 persen kecelakaan disebabkan minimnya marka jalan, kemudian surat-surat tidak jelas,” ujarnya.

Yoseph mengajak seluruh pihak untuk mematuhi aturan perundang-undangan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. “Dampak kecelakaan tidak hanya menimpa supir, tetapi juga penumpang, dan pengusaha, selain itu korban juga harus diperhatikan karena diatur didalam UU, semoga saja kedepan penyelenggaraan lalu lintas semakin meningkat,” katanya.

Berdasarkan data kepolisian, dalam kurun 2007-2012, ada 456.142 kecelakaan di jalan raya. Dari seluruh kecelakaan tersebut 143.791 korban meninggal, dan 796.647 korban mengalami luka-luka. Dari 41 kasus kecelakaan yang diinvestigasi KNKT, jumlah korban meninggal tercatat 452 jiwa. Sedangkan 618 korban lainnya luka-luka. (si)foto:ap/parle/ry



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Duta Besar Jerman untuk Indonesia yang baru Dr. Georg Witschel, di ruang kerja Ketua DPR, Nusantara III, Kamis (14/3). foto:RY



Wakil Ketua DPR Pramono Anung bertemu dengan Dubes Ekuador Eduardo Alberto Calderon Ledesma di Gedung Nusantara III, Kamis, (14/3). foto:RY



Wakil Ketua BKSAP Andi Azhar Cakrawijaya dan Ketua GKSB Korea Agus Hermanto menerima Delegasi Majelis Nasional Republik Korea yang dipimpin Hon. AHN Hong Joon di ruang tamu BKSAP Lt.4, Nusantara III, Senin (11/3). foto:RY



Serah terima Nota Kesepahaman Antara Parlemen Indonesia (DPR RI) yang ditandatangani Ketua BKSAP Surahman Hidayat dengan Parlemen Bahrain ditandatangani Abdulrahman Rashid Bumjaid, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (14/3). foto:RY



Rapat Timwas Kasus Bank Century DPR dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dengan Menkumham Amir Syamsudin, Menkeu Agus Martowardojo, Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo, Jaksa Agung Basrief Arif, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Akting Konjen RI untuk Hongkong, Hari Budiarto. mengenai pengembalian aset Bank Century di luar negeri. Nusantara DPR, Rabu (13/3). foto:RY

